

**Warga Menolak Lokasi Penampungan Sampah****Dinas Kebersihan Jakarta Akan Bangun TPS Ramah Lingkungan**

DKI Jakarta kekurangan tempat penampungan sampah sementara. Namun, upaya untuk menambah penampungan menghadapi penolakan warga dan sulitnya membebaskan lahan. Selain harga jual lahan tinggi, warga tidak ingin terganggu dengan keberadaan penampung sampah di dekat tempat tinggal mereka. Keberanian Pemerintah Provinsi DKI menyediakan lahan untuk tempat penampungan sementara (TPS) sampah dinilai penting untuk mengatasi tambahan produksi sampah. Selain soal harga tanah, pemerintah dituntut memberikan contoh TPS yang ramah lingkungan. Sejumlah perangkat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan mengaku kesulitan memperoleh tanah TPS baru. Lurah Pondok Bambu Budhi Nofian, Rabu (25/6), mengatakan telah berupaya mencari lahan untuk TPS sampah. Namun, lahan sulit diperoleh. Menurut dia, ada dua hal yang menjadi kendala, yaitu warga menginginkan harga beli tanah di atas nilai jual obyek pajak (NJOP) dan sejumlah warga menolak pendirian TPS di dekat tempat tinggal mereka. "Onggokan sampah bertebaran di area permukiman warga karena ketiadaan TPS. Namun, mereka menolak pendirian TPS di tempat tinggal mereka," katanya. Permasalahan lain, kata Budhi, terkait kepemilikan lahan. Di Pondok Bambu, misalnya, ada lahan seluas 2.000 meter persegi dengan lebih dari 20 bangunan. Area itu layak dijadikan TPS karena jauh dari permukiman. Namun, penghuni lahan itu tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Akibatnya, tim Panitia Pengadaan Tanah tak berani membeli tanah. Hingga saat ini, Jakarta hanya memiliki 210 TPS. Tempat penimbunan sampah di pinggir jalan yang ada saat ini merupakan pul gerobak sampah dan tersebar di 1.000 lokasi. Pul itu umumnya hanya berupa kontainer sampah.

**Berkurang**

Di Jakarta Utara, empat dari 14 TPS tidak bisa dipakai lagi, antara lain karena jalan menuju depo menyempit hingga tak bisa dilalui truk pengangkut sampah, seperti terjadi di Depo Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, dan Depo Sukapura, Kecamatan Cilincing. Kondisi itu memaksa warga menumpuk buangan di tepi jalan dan lahan kosong. Akibatnya, sampah tercecer, menebarkan bau busuk, dan mengotori jalan. Rohani (61), tokoh warga RW 001 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, mengatakan, warga terpaksa menumpuk sampah yang telah dibungkus plastik di tepi jalan. Sebagian sampah ditumpuk di bawah pohon di sekitar rumah warga. Menurut Rohani, kebutuhan lahan untuk TPS sebenarnya relatif kecil, yakni 10-15 meter persegi. Namun, sulit mendapatkan lahan dengan luas tersebut di lokasi yang memungkinkan truk pengangkut keluar masuk.

**Menumpuk**

Di Jakarta Selatan, tumpukan sampah antara lain terlihat di kawasan Kebayoran Lama, Jalan Ciledug Raya. Sampah yang dibungkus tas plastik bertumpuk di TPS di pinggir jalan dekat kompleks ruko di Pasar Kebayoran Lama. Di tempat-tempat usaha di sekitar pasar, sampah juga dibiarkan teronggok. "Tidak diambil-ambil sudah lebih dari dua tiga hari, jadinya banyak begini," kata Roni, pegawai salah satu usaha bengkel di Kebayoran Lama. Di halaman depan tempat usaha pencucian mobil dan sepeda motor terdapat berkarung-karung sampah. Di trotoar, sampah dibiarkan memenuhi kotak kayu bercampur dengan sisa daun dan sayuran, sisa kegiatan pedagang kaki lima yang buka dari malam hingga pagi hari. Di kawasan lain, seperti di Jalan Fatmawati, sampah yang tidak terangkut juga cukup banyak. Sementara di Lenteng Agung, kelurahan setempat sudah protes sejak beberapa bulan lalu atas adanya TPS liar di wilayah mereka. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan masih kesulitan memperoleh lahan untuk TPS. Sejak satu tahun lalu, kebutuhan lahan untuk TPS disosialisasikan ke perangkat kecamatan hingga RW, menurut Ediningtyas, masih minim sekali yang mengusulkan. Padahal, TPS yang akan didirikan dipastikan ramah lingkungan, tak menimbulkan polusi ke lingkungan sekitarnya. "TPS yang kami bangun ini menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dipagari dengan sabuk hijau, berupa penghijauan yang dapat menahan polusi udara," katanya. Menurut Ketua RW di Kelurahan Duren Sawit Kokon Sukanda, jika memang TPS itu ramah lingkungan, pemerintah perlu memberikan contoh TPS terlebih dahulu kepada warga. Contoh itu untuk memberikan kepercayaan kepada warga bahwa TPS yang dibangun tak menimbulkan polusi. Di RW 016 Kelurahan Duren Sawit, tempat Kokon menjabat sebagai ketua RW, tempat penimbunan sampah yang tersedia berada di tengah permukiman warga. Warga yang rumahnya berhadapan dengan tempat sampah selalu mengeluhkan bau tak sedap dari timbunan sampah.

"Tapi, masalahnya jika tempat sampah itu ditutup, warga juga tak memiliki tempat untuk membuang sampah," kata Kokon. Namun, lanjut Kokon, saat ditawarkan agar ada warga yang bersedia lahan tempat tinggal mereka dijual untuk TPS juga tak ada yang bersedia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso menambahkan, sampah akan selamanya menjadi masalah tanpa partisipasi masyarakat. "Jika tidak belajar mengurangi sampah, selama itu akan menjadi masalah. Apalagi dengan paradigma sampah bukan urusan masyarakat, melainkan urusan pemerintah. Ini paradigma yang salah," ujarnya. Andi menambahkan, pihaknya berencana membangun insinerator kecil di setiap TPS. Targetnya, sampah langsung tertangani begitu tiba di TPS dan tidak terlalu memikirkan lagi bagaimana mengangkutnya. Dia berharap masyarakat membantu dengan memilah dan mengurangi sampah. Soal anggaran, lanjut Andi, tidak masalah. Targetnya, semua TPS dilengkapi insinerator agar tidak ada biaya angkutan dari TPS ke Bantar Gebang. Pembangunan insinerator dinilai akan memotong banyak hal. Selain biaya pengangkutan, biaya perawatan kendaraan pengangkut truk juga berkurang. Andi berharap ada partisipasi dari swasta meski pemerintah sanggup membiayainya. Program tersebut kini mulai direncanakan dan akan dijalankan pada tahun 2015. Pemerintah tengah merancang detail desain teknik, menyiapkan dokumen pengadaan, dan mulai pengadaan tahun depan.

Sebelum rencana itu berjalan, pemerintah berupaya memperbaiki kinerja. Kontrak dengan pihak ketiga dilakukan sesuai hasil kerjaan. Andi mengusulkan sanksi terkait pengurangan sampah di tingkat keluarga. Menurut dia, regulasi sampah selama ini belum tegas. Swasta diminta mengoptimalkan perannya. (MDN/NEL/NDY/MKN/BRO)